	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa Rinaldi Hermansyah	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta, 24 Desember 1993 b) Nama Orang Tua : Syafriman dan Yenetri c) Fakultas : Hukum d) PK : Hukum Administrasi negara (PK VII) e) No. Bp : 1210112167	f) Tanggal Lulus : 27 April 2016 g) Predikat Lulus : Dengan Pujian h) IPK : 3,75 i) Lama Studi : 3 Tahun 8 Bulan j) Alamat : Rumah Panjang Nagari Bayua , Kec. Tanjung Raya	

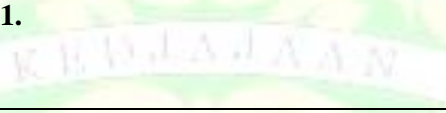

Rinaldi Hermansyah, BP 1210112167, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VIII). 70 Halaman. Tahun 2016

ABSTRAK

Tenaga Honorer merupakan Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dalam waktu tertentu dan bekerja pada pemerintah namun berkedudukan bukan sebagai PNS. Penerimaan tenaga honorer merupakan salah satu bentuk antisipasi pemerintah terhadap banyaknya kebutuhan pegawai namun dibatasi oleh terbatasnya jumlah PNS yang ada, guna melaksanakan tugas umum pemerintahan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tenaga honorer bukan lagi bagian dari Pegawai yang bekerja pada pemerintahan seperti dalam Undang-Undang Kepegawaian sebelumnya. Dengan demikian Pegawai ASN terbagi atas dua yaitu PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang ASN tersebut. Pada praktiknya keberadaan tenaga honorer masih sangat dibutuhkan agar tugas pemerintahan tetap berjalan. penulis merumuskan 2 masalah, 1) Perlindungan hukum bagi tenaga honorer dilingkungan pemerintah Kota Padang pasca pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2) Kendala dalam perlindungan hukum bagi tenaga honorer dilingkungan pemerintah Kota Padang pasca pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam merumuskan masalah tersebut penulis menggunakan metode yaitu yuridis sosiologis terkait dalam pengumpulan data, study dokumentasi, dan wawancara dengan Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang sebagai pelaksana manajemen kepegawaian dalam membantu tugas pokok pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis teliti adanya penghapusan kedudukan tenaga honorer dalam Undang-Undang ASN namun pada praktiknya tenaga honorer masih dibutuhkan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Demikian juga dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pegawai Honorer dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Padang. Namun perlindungan hukum juga terhambat dengan bererapa kendala baik secara yuridis maupun non yuridis.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada 27 April 2016. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji

Tanda Tangan	1.	2.
		
Nama Terang	Frenadin Adegustara, S.H., M.S	Titin Fatimah, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara : **Syofiarti, S.H., M.Hum**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapatkan nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan: